



Implementasi Program Kartu Tani Sibedas Di Kabupaten Bandung

Implementation of the Sibedas Farmer Card Program In Bandung Regency

Rudi Kresna

**Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung
rudikresna77@gmail.com**

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program dimaksudkan untuk menganalisis implementasi program ‘Kartu Tani Sibedas’, yang dilaksanakan pada tahun 2022-2023 di Kabupaten Bandung, dipersepsi, disikapi, dan bersinergi dengan strategi penghidupan petani di Kabupaten Bandung. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang tercantum dalam Perda Nomor 10 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang dimaksud dengan Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 24 informan dan FGD sebagai teknik pengumpulan data utama. Hasilnya Kartu tani Sibedas telah tersampaikan dengan baik di penghujung tahun 2023. Meskipun dampak dan manfaat dari kartu tani Sibedas belum terlihat dengan jelas, terdapat beberapa hal yang menunjukkan bagaimana kartu tani Sibedas dapat mendukung strategi penghidupan petani, sekalipun dengan signifikansi yang kecil. Kartu tani Sibedas membantu memahami kompleksitas masalah pertanian dan beberapa pola-pola interaksi sosial yang masih kental terlihat di masyarakat pedesaan Kabupaten Bandung. Salah satu yang terlihat dari pelaksanaan Kartu Tani Sibedas adalah masih kuatnya nilai-nilai kebersamaan (kolektivitas) antar petani yang ditunjukkan oleh anggota kelompok tani yang mendapat bantuan hibah yang juga membagi rata bantuan kepada anggota kelompok tani yang tidak mendapatkan bantuan hibah.

Kata Kunci : Implementasi Program, Kartu Tani Sibedas, Pendidikan, Regulasi

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Merdeka Belajar program in Bandung Regency and build rational arguments for government to support intervention in implementing the Merdeka Belajar program in Bandung Regency. The approach used is qualitative using surveys and literature studies using interviews and surveys. Informants in this research were selected using purposive sampling. The informants consisted of representatives from various related elements. From the district level, they are members of the Bandung Regency Learning Mobilization Team, which consists of elements from the Education Office, Inspectors/Supervisors, School Principals and Teachers who are representatives from PAUD, SD, SMP and PNFI levels. The findings of the study showd that the implementation of the Merdeka Belajar program in Bandung regency was carried out through the National Assessment and Learning Environment Survey, the Mobilizing Teacher, the Mobilizing School, IKM and PMM, and special education transformation program. Therefore, it is necessary to design policies and regulations such as regent's regulations that support Independent Learning, including regulations that facilitate National Assessments, Mobilizing Teacher Programs, Mobilizing School Programs, Implementing the Independent



Curriculum, Utilizing Educational Report Cards and Inclusive Special Education Programs. Widespread outreach was carried out to understand the community, teachers and related parties about the concept and benefits of Merdeka Belajar; policy changes and implementation steps for all stakeholders.

Keywords: Implementation, Program, Freedom to Learn, Education, Regulation

A. PENDAHULUAN

Sektor Pertanian merupakan salah satu sumber mata pencaharian utama penduduk dan daya dukung sistem ekonomi di Indonesia. Data BPS menyebutkan bahwa sebanyak 40,69 juta orang, atau hampir seperlima dari jumlah penduduk di negeri ini, bekerja pada sektor pertanian. Dengan kondisi ini, tidak dapat dipungkiri pula, sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap ekonomi nasional. Pada tahun 2022, BPS menyebutkan bahwa pertanian menyumbang 12,4 persen dari Produk domestik bruto (PDB). Yang menempatkan sektor pertanian menempati posisi ketiga penyumbang PDB setelah Industri (18,3%) dan Perdagangan (12,8%). Terlepas dari potensi tersebut, sejak tahun 2018, pertumbuhan ekonomi pada sektor ini mengalami penurunan, terutama pada saat pandemic (2020), dimana pertumbuhan sektor hanya sebesar 1,77%, dibanding dengan pertumbuhan di tahun 2018, yang mencapai 3,88%.

Tren penurunan tersebut tidak lepas dari kerentanan pelaku usaha pertanian dalam merespons perubahan, seperti tekanan atau guncangan yang mempengaruhi sistem bisnis dan pelaku sektor ini. Petani kecil sebagai salah satu pelaku usaha utama sektor pertanian di Indonesia sering menjadi subjek yang mudah terekspose oleh perubahan-perubahan tersebut, diantaranya perubahan iklim, variabilitas ekonomi, dan kejadian *force majeure* yang datang secara tiba-tiba (banjir, gempa, pandemi, dan lain-lain). Salah satu tolak ukur kerentanan dari petani kecil tersebut di antaranya ditunjukkan dari menurunnya jumlah pelaku usaha petani kecil. Mereka beralih profesi dari sektor pertanian ke sektor non pertanian, seperti sektor perdagangan dan jasa, ataupun sektor industri. Fenomena ini dikhawatirkan dapat mengganggu keberlanjutan pertanian di Indonesia.

Kabupaten Bandung yang memiliki populasi petani rakyat yang cukup signifikan dan menjadi salah satu produsen pangan yang sangat potensial untuk mencukupi pasokan pangan bagi wilayah Jawa Barat dan Kabupaten Bandung itu sendiri. Pada tahun 2021, di wilayah ini, diperkirakan terdapat 145 ribu petani (liputan6.com, 2022). Petani-petani tersebut umumnya terhimpun dalam kelompok-kelompok tani dan ternak yang tersebar di 31 Kecamatan.

Berdasarkan catatan BPS, pada tahun 2022, terdapat 3211 kelompok tani, yang digolongkan dalam tiga kategori kelompok tani, “Kelompok Tani Pemula” (2403), “Kelompok Tani Lanjut” (720), “Kelompok Petani Madya” (83), dan “Kelompok Petani Utama” (83). Kelompok-kelompok ini didominasi oleh petani sayuran (hortikultura), seperti bawang merah, bawang dau, cabe rawit, wortel, kubis, tomat, cabe merah, dan kentang. Selain itu Kabupaten Bandung memiliki potensi kelompok peternak sapi perah, yang berpotensi menyumbang 18-20% produksi susu nasional.

Terlepas dari besarnya potensi petani yang tersebut diatas, petani di Kabupaten Bandung, yang didominasi kelompok petani pemula, rawan akan perubahan yang dapat



mengganggu usaha pertanian mereka. Ditambah dengan karakteristik mereka yang bertani dengan skala kecil, baik dari segi luas lahan garapan, modal, atau kepemilikan ternak, petani kecil sering mendapatkan kesulitan apabila mengalami kegagalan panen, akibat perubahan musim atau penyakit ternak. Sebagai contoh, wabah penyakit mulut dan kuku telah menyebabkan peternak merugi, karena banyak ternak yang mati akibat wabah tersebut. Peternak-peternak tersebut sulit untuk memulai kembali usahanya, karena tidak mempunyai modal usaha yang cukup untuk mengganti ternak yang mati.

Dalam rangka melindungi keberlanjutan usaha petani kecil di wilayah Kabupaten Bandung, pemerintah daerah menginisiasi berbagai kebijakan dan program pembangunan petani. Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Perda ini sangat diperlukan, sebagai salah satu bentuk kebijakan untuk memberikan arah, dan landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan strategis dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani. Langkah ini sangat penting melindungi usaha petani kecil dari berbagai perubahan, seperti iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak pada petani. Sebagai bentuk dari tindaklanjut dari Perda tersebut adalah Peraturan Bupati nomor 138 tahun 2021 tentang Program Petani Bedas Sejahtera. Peraturan ini mengatur secara teknis pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah tersebut di atas. Salah satu bentuk implementasi dari Program Petani Bedas Sejahtera, adalah Program Kartu Tani Sibedas yang diinisiasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bandung tahun 2022. Kartu tani ini tidak hanya menjadi kartu identitas petani, tetapi dapat digunakan sebagai transaksi perbankan, dan alat untuk mendapatkan akses bantuan premi asuransi usaha tani. Program ini memberikan perlindungan berupa pemberian bantuan premi asuransi bagi petani padi dan peternak sapi, dalam memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen yang disebabkan oleh banjir, kekeringan dan serangan hama pengganggu tanaman.

Mengingat pentingnya tujuan program ini dalam mendukung kesejahteraan petani, maka Pemda Kabupaten Bandung melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) melakukan kajian Dampak Program Kartu Tani Sibedas bagi Peningkatan Ketahanan Petani di Kabupaten Bandung. Kajian ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana program ini dapat berkontribusi sebagai salah satu faktor yang mendorong terbangunnya ketangguhan ketahanan petani, serta bersinergi dengan strategi penghidupan petani pada umumnya. Selanjutnya hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan program ini untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan program pada tahun-tahun selanjutnya

Pelaksanaan kajian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi bagaimana program 'Kartu Tani Sibedas', yang dilaksanakan pada tahun 2022-2023 di Kabupaten Bandung, dipersepsi, disikapi, dan bersinergi dengan strategi penghidupan petani di Kabupaten Bandung. Sesuai dengan kebijakan Pemda Kabupaten Bandung yang tercantum dalam Perda Nomor 10 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang dimaksud dengan Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.



Program Kartu Tani Sibedas merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut sebagai upaya Pemda untuk meningkatkan ketahanan atau resiliensi petani dalam menghadapi masa sulit yang yang tersebut di atas. Dalam hal ini, program ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat kepada petani, diantaranya: 1) Memberikan akses bagi petani untuk mendapatkan sarana dan prasarana; 2) mempermudah akses permodalan di perbankan melalui program kredit usaha rakyat; 3) Fasilitas asuransi usaha tani padi atau asuransi usaha ternak sapi; 4) memberikan akses untuk memperoleh asuransi keselamatan kerja petani; 5) Mempermudah akses pembelian hasil pertanian; 5) Memberikan akses pembelian hasil pertanian; 6) Memberikan akses prioritas pelatihan dan pengembangan usaha tani; 7) memberikan akses untuk memperoleh beasiswa bagi keluarga petani.

Memperhatikan konsep dari manfaat program Kartu Tani di atas, kajian ini akan diarahkan untuk menganalisa, sejauh mana manfaat-manfaat tersebut terealisasi dan dapat berdampak terhadap ketahanan petani dalam menghadapi masa sulit. Terutama kondisi-kondisi kritis yang bisa berdampak pada kerugian usaha pertanian dari petani skala kecil di Kabupaten Bandung.

B. TINJAUAN LITERATUR

Pemberdayaan dan Perlindungan Petani Melalui Kartu Tani Sibedas

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang dimaksud dengan Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim. Sedangkan Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan kelembagaan petani.

Menurut laman resmi Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Kartu Tani SIBEDAS adalah Sistem Bertani dengan Agro Solution, yang merupakan Upaya Program Perlindungan Petani berlandaskan peraturan di atas. Tujuan Penggunaan Kartu Tani SIBEDAS adalah yaitu sebagai: (1) Kartu identitas petani, (2) Alat transaksi perbankan, (3) Untuk mendapatkan akses bantuan premi asuransi usaha tani komoditas pangan utama yang selanjutnya diperluas menjadi bantuan hibah sarana produksi pertanian. Manfaat Kartu Tani SIBEDAS di tahun 2022 yaitu melingkupi asuransi pertanian pada: (1) Komoditas Padi / AUTP dan (2) Asuransi Usaha Ternak Sapi / Kerbau / AUTSK. Pada tahun 2023 dianggarkan dana sebanyak 25 Miliar Rupiah untuk 50.000 petani dalam program Kartu Tani Sibedas yang akan disalurkan sebagai bantuan sarana produksi pertanian kepada petani yang memenuhi persyaratan melalui Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kerjasama Dinas Pertanian Kabupaten Bandung dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), terdapat tiga asuransi untuk petani yang ditanggung. Yang pertama yaitu Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) memberikan jaminan atas kerugian akibat kegagalan panen pada tanaman padi yang disebabkan oleh banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan. Yang kedua, Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) memberikan jaminan atas kerugian akibat kematian/kehilangan ternak sapi betina yang



disebabkan beranak, penyakit, kecelakaan dan hilang dicuri. Dan yang ketiga Jasindo Health Cash Plan (JHCP) yang memberikan jaminan santunan atas keselamatan petani yang disebabkan meninggal, cacat tetap, pengobatan akibat kecelakaan dan biaya pemakaman.

Perbandingan dengan Pelaksanaan Kartu Tani Nasional dari Kementerian Pertanian

Sebagai perbandingan secara nasional, program kartu tani diinisiasi oleh Kementerian Pertanian untuk mengefisienkan pendistribusian pupuk bersubsidi dengan tujuan hanya petani kecil yang menjadi sasaran pemberian subsidi/bantuan ini. Kartu tani dirancang secara khusus untuk untuk petani kecil yang implementasinya dimulai di Pulau Jawa. Perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (HIMBARA) memegang peran yang penting dalam pelaksanaannya di lapangan. Dimulai pada tahun 2018, tiga bank BUMN bekerjasama dengan Kementerian Pertanian menerbitkan kartu tani tersebut, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Provinsi Banten, Yogyakarta, dan Jawa Tengah, Bank Mandiri di Jawa Barat dan Bank Negara Indonesia (BNI) di Jawa Timur (Gunawan dan Pasaribu, 2020).

Sejak diluncurkan pada 2016, aplikasi program kartu tani belum menunjukkan kemajuan implementasi yang baik sebagaimana diharapkan (Ashari & Hariani, 2019). Perencanaan penggunaan pupuk oleh kelompok tani, lokasi kios penjual pupuk yang jauh dari lokasi petani, jenis pupuk yang dibutuhkan tidak selalu tersedia, dan volume pupuk yang akan dibeli tidak cukup efisien dalam hal transportasi, merupakan beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi kartu tani di lapangan. Harus diakui bahwa di kalangan petani masih banyak yang belum mengerti dan memahami pemanfaatan kartu tani. Kurang efektifnya penyelenggaraan sosialisasi dan promosi di tingkat petani oleh para pemangku kepentingan diduga berkontribusi terhadap rendahnya pemanfaatan kartu tani ini. Dukungan dinas terkait dan jalinan kerjasama dengan pihak perbankan (Himbara) yang ditugasi melaksanakan aplikasi kartu tani tidak selalu menggembirakan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, timbul pertanyaan bahwa apakah petani sudah memperoleh informasi yang lengkap terkait kartu tani serta bagaimana pemahaman dan persepsi petani tentang manfaat dan implementasi kartu tani (Gunawan dan Pasaribu, 2020).

Pada prinsipnya kartu tani berfungsi sebagai kartu debit untuk penerimaan tabungan, pinjaman, subsidi maupun bantuan yang memuat identitas petani pemilik kartu. Kartu tani merupakan suatu basis data yang berisi data dan informasi terkait dengan identitas petani (nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamat), luas lahan, komoditas, alokasi pupuk bersubsidi, kebutuhan sarana produksi pertanian (saprotan), dan hasil panen. Manfaat lain dari kartu tani adalah memberikan informasi dan monitoring bagi pemerintah daerah, BUMN penyedia saprotan, maupun BUMN off taker yang menangani pupuk bersubsidi. Latar belakang program kartu tani adalah dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil litbang KPK, BPK, dan amanat APBN terkait penyaluran bantuan pemerintah yang tepat sasaran, termasuk pupuk bersubsidi (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2018). Selain itu, juga dalam rangka pembenahan data base petani berbasis NIK dan input RDKK dalam e-RDKK. Namun, program kartu tani yang diinisiasi mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 ini, implementasinya masih tergolong rendah (Gunawan dan Pasaribu, 2020).



Sistem kartu tani ini dirancang untuk dapat mengakses fasilitas yang disediakan oleh bank penerbit (dalam hal ini Bank BRI), Kementerian Pertanian, Bulog, PT. Pupuk Indonesia, dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini berperan di proses entri data, verifikasi, monitoring, dan sosialisasi oleh penyuluh. Lebih lanjut, Kementerian Pertanian berfungsi menetapkan alokasi pupuk tepat waktu, sedangkan penyedia pupuk (PT. Pupuk Indonesia) melakukan manajemen stok sarana produksi pertanian dan memantau ketersediaan sapras. Sementara itu, pihak bank bertugas melakukan penerbitan kartu tani, membangun Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI), dan menerima deposit kartu tani dari petani anggota (Gunawan dan Pasaribu, 2020).

Dengan adanya kartu tani yang terintegrasi secara daring, pemerintah dapat memantau hasil produksi petani dan distribusi pupuk. Selain itu, petani akan mendapat kepastian pupuk bersubsidi, melatih menabung dan kemudahan menjual produknya. Kios pupuk mendapatkan tambahan penghasilan sebagai BRI-link, sedangkan pemerintah berupaya mendorong dan mensosialisasikan program ini. Pada kenyataannya, pemanfaatan kartu tani tidak selalu sejalan dengan perencanaannya (Gunawan dan Pasaribu, 2020).

Beberapa masalah yang muncul diantaranya petani mengalami kesulitan dalam memanfaatkan fasilitas ini karena harus menyetorkan uang deposit terlebih dulu ke bank sebelum dapat menggunakan kartu tani. Selain itu, juga terdapat kendala terkait waktu, biaya transportasi, dan kurangnya budaya menabung secara individu, serta kebutuhan pupuk tidak terlalu besar (sesuai luas lahan garapan yang relatif sempit). Dari sisi pengecer, terdapat kesulitan dalam hal menerima dan menyetor uang deposit kartu dari petani ke bank, dan secara bisnis tidak menguntungkan. Pihak pemerintah dan bank kurang melakukan sosialisasi ke petani, dan hanya berperan dalam pendistribusikan kartu saja (Biro Perencanaan Kemtan, 2019). Pada tahun 2019, pemerintah belum mewajibkan penggunaan kartu tani di seluruh Indonesia. Program kartu tani yang diinisiasi mulai tahun 2016, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dimana pada tahun 2017 kartu tani baru diterapkan di Pulau Jawa (Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi DI Yogyakarta).

Selanjutnya pada tahun 2018, program ini diperluas di 10 provinsi di luar Pulau Jawa, yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Selatan (Sumsel), Lampung, Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), Sulawesi Selatan (Sulsel), Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sehubungan dengan telah dilakukannya uji coba di beberapa lokasi pada tahun 2017-2018, maka perlu dilakukan evaluasi terkini untuk mendapatkan tambahan informasi terkait penggunaan kartu tani. Kebijakan penebusan pupuk subsidi dengan kartu tani merupakan upaya transparansi dan akuntabilitas penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani. Selain itu, uji coba penerapan kartu tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi yang dilakukan petani di kios pengecer resmi bermanfaat untuk menjamin penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran.

Mekanisme kerja Kartu tani diawali dengan aktivisasi kartu oleh bank penyalur, dimana di dalam kartu tani sudah diinput jumlah kuota pupuk bersubsidi (Urea, NPK, SP-36, Organik) yang berhak diterima oleh masing-masing petani. Kuota jumlah pupuk tersebut didasarkan pada luas lahan yang ada di e-RDKK. Kartu tani juga berfungsi sebagai kartu debit yang dapat diisi uang deposit, sehingga pada saat petani membeli pupuk di kios, mereka tinggal menggesek kartu tersebut di mesin Electronic Data Capture (EDC). Pada saat



transaksi akan terlihat jumlah jatah pupuk subsidi yang diambil petani, dan selanjutnya petani membayar sesuai HET. Temuan di lapangan, petani menggunakan kartu tani hanya untuk mengetahui jumlah kuota pupuknya, kemudian menggesek kartu tersebut di EDC, tetapi pembayaran secara tunai di kios.

Selain itu, beberapa kasus di Bali dan DIY ditemui kartu tani yang kuotanya masih kosong, sehingga tidak dapat dipakai untuk menebus pupuk. Kuota pupuk bersubsidi yang berhak ditebus petani didasarkan pada luas lahan yang di input pada e-RDCK. Data tersebut diinput oleh penyuluh, kemudian bank menerbitkan kartu, dan selanjutnya petani menebus pupuk di kios yang ditunjuk sesuai e-RDCK. Kewajiban lain Koordinator Penyuluh dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) adalah mensosialisasikan kartu tani kepada petani dan kios distributor (Mufidah & Prabawati, 2018).

Kartu tani dikeluarkan oleh Perbankan, diberikan kepada petani untuk digunakan sebagai alat transaksi untuk menebus pupuk bersubsidi melalui mesin EDC di pengecer resmi. (Gunawan dan Pasaribu, 2020). Berkaca dari pelaksanaan dua program kartu tani tersebut baik secara nasional maupun Kartu Tani Sibedas diperlukan evaluasi kebijakan dan implementasi dari manfaat Kartu Tani kepada Petani, khususnya Kartu Tani Sibedas yang merupakan pokok kajian dalam laporan ini. Apakah dengan adanya Kartu Tani tersebut bisa meningkatkan resiliensi petani atau tidak, juga apakah sudah efisien dari sisi Pemerintah dan Stakeholder lain yang terkait, baik terkait anggaran ataupun kebijakan.

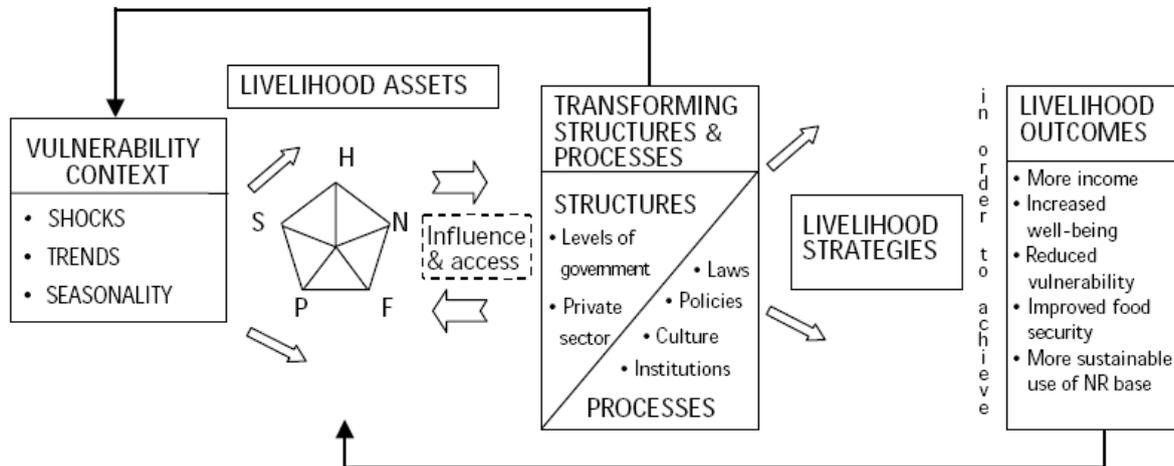
Sebagai perbandingan secara nasional, program kartu tani diinisiasi oleh Kementerian Pertanian untuk mengefisienkan pendistribusian pupuk bersubsidi dengan tujuan hanya petani kecil yang menjadi sasaran pemberian subsidi/bantuan ini. Kartu tani dirancang secara khusus untuk untuk petani kecil yang implementasinya dimulai di Pulau Jawa. Perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (HIMBARA) memegang peran yang penting dalam pelaksanaannya di lapangan. Dimulai pada tahun 2018, tiga bank BUMN bekerjasama dengan Kementerian Pertanian menerbitkan kartu tani tersebut, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Provinsi Banten, Yogyakarta, dan Jawa Tengah, Bank Mandiri di Jawa Barat dan Bank Negara Indonesia (BNI) di Jawa Timur (Gunawan dan Pasaribu, 2020).

Tingkat resiliensi petani penerima manfaat di Kabupaten Bandung yang dipengaruhi oleh dampak dan manfaat dari Kartu Tani Sibedas merupakan tolok ukur untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan juga peningkatan program Kartu Tani Sibedas kedepannya. Dengan demikian, keterlibatan petani dan stakeholder dalam pelaksanaan kajian ini menjadi faktor penting untuk mendapatkan output yang tepat sasaran.

Penulis menggunakan kombinasi dari beberapa pendekatan di dalam menilai dampak dari kartu tani. Pertama, kami menggunakan kerangka Sustainable Livelihood Approach (SLA) (DFID, 2000; Scoones, 2015), yang berguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi modal dasar masyarakat pedesaan (dalam hal ini petani) di dalam membangun strategi penghidupan, dikaitkan dengan intervensi yang diberikan oleh pemerintah serta guncangan yang dihadapi. Kerangka SLA memetakan modal dasar masyarakat ke dalam empat kategori, yaitu modal alam, modal manusia, modal sosial, dan modal finansial. Kombinasi dari empat bentuk modal ini dapat menentukan strategi penghidupan yang sesuai. Intervensi pemerintah yang sejalan dengan kombinasi modal masyarakat ini dapat berpotensi meningkatkan penghidupan masyarakat, tetapi juga



mengurangi ruang-ruang penghidupannya apabila tidak disampaikan dengan tepat. Gambar 1 menunjukkan kerangka SLA dimaksud.



Gambar 1 Kerangka SLA (sumber: DFID, 2000)

C. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan FGD sebagai teknik pengumpulan data utama. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 24 informan yang bersinggungan langsung dengan program kartu tani Sibedasi di Kabupaten Bandung, yang terdiri atas 20 petani dan empat penyuluh di tingkat kecamatan. Selain itu, FGD yang dilakukan dengan Dinas Pertanian dan para pemangku kepentingan menjadi basis data yang penting di dalam pendalaman selanjutnya melalui wawancara. Beberapa kategori calon informan pada kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemangku kepentingan, diantaranya adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Bandung, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, dan pemangku kepentingan tingkat kabupaten lainnya yang terkait
2. Penyuluh Pertanian di empat kecamatan: Ciparay, Nagreg, Bojongsoang dan Pasirjambu
3. Petani penerima manfaat Kartu Tani Sibedasi

Lokasi pengumpulan data bertempat di sentra-sentra pertanian di empat kecamatan di atas untuk wawancara mendalam terhadap petani penerima manfaat Kartu Tani Sibedasi. Penentuan informan dilakukan secara *snowball*, yaitu mengidentifikasi calon informan selanjutnya berdasarkan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Data awal beberapa calon informan dan lokasinya akan didiskusikan bersama dengan BAPPELITBANGDA Kabupaten Bandung dan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung sebagai titik mula dari rangkaian *snowball* yang akan dilakukan. Proses *snowball* dan wawancara berlanjut hingga



informasi yang didapat dirasa sudah jenuh/tidak terdapat lagi informasi baru yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan kajian.

Rumah tangga tani yang dipilih sebagai narasumber adalah mereka yang telah menerima kartu tani, dengan beberapa rumah tangga tani yang tidak menerima kartu tani di lokasi yang sama, sebagai pembanding. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yang mengedepankan kedalaman informasi, tetapi tidak menggunakan jumlah sampel minimum seperti layaknya *random sampling*. Selain wawancara, peneliti juga akan melakukan participant observation untuk memahami keseharian petani di lingkungan alaminya. Wawancara pendukung juga akan dilakukan terhadap tokoh masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pengelola asuransi dan kartu tani, untuk memperoleh gambaran tentang konsep dasar kartu tani dan implementasinya di lapangan.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) terhadap hasil wawancara dan temuan lapangan, dengan tetap mengacu pada kerangka SLA dan resiliensi komunitas. Analisis bersifat deskriptif, meskipun beberapa data kuantitatif digunakan untuk menguatkan konteks. Proses kodifikasi data dan analisis hubungan tematik dari data akan dilakukan menggunakan software NVivo 12. Rumusan rekomendasi kebijakan dilakukan secara deskriptif, tetapi diperkuat dengan metode AHP, untuk menentukan prioritas strategi kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komoditas pertanian utama yang dibudidayakan di Kecamatan Pasirjambu yaitu Teh, Kopi, dan Labu Siam. Di bawah ini merupakan uraian gambaran kehidupan petani di Kecamatan Pasirjambu pada keempat komoditas tersebut. Dijelaskan bagaimana kondisi secara umum beserta kendala-kendala yang dihadapi oleh petani. Sedikit diuraikan pula mengenai bantuan Kartu Tani Sibedasi di Kecamatan Pasirjambu.

Salah satu desa yang menjadi tempat survei dan observasi untuk teh adalah Desa Margamulya, Kecamatan Pasirjambu. Perkebunan teh rakyat di Desa Margamulya ada setidaknya sejak tahun 1978. Kebun teh milik petani anggota biasanya tersebar, tidak terkumpul di dalam satu hamparan (*patchy*), dengan luas rata-rata sekitar 3.000 m². Sementara total luas yang dimiliki satu orang petani berkisar antara 0,5 - 2 Ha, dengan status kepemilikan lahan pribadi/hak milik. Biasanya, ketika menanam teh, petani juga menanam kopi di pinggir kebun tehnya. Pucuk teh di satu kebun yang sama dapat dipetik setiap 2 bulan sekali. Setiap selesai panen, satu kebun perlu waktu 2 bulan untuk siap panen kembali. Selama menunggu masa panen selanjutnya, petani biasanya memetik pucuk teh di petakan kebun lain miliknya. Setiap harinya, petani mengumpulkan hasil panennya di sekretariat kelompok. Produksi pucuk teh basah satu orang petani adalah 100-120 Kg/hari panen, Setelah seluruh hasil panen dari para anggota terkumpul di siang/sore hari, kelompok akan menjualnya ke PT Kartini, sebuah pabrik teh yang jaraknya sekitar 2 Km dari sekretariat Kelompok Tani Tanimulya. Pembayaran akan dilakukan oleh pabrik kepada kelompok tani pada dua minggu kemudian, dengan harga Rp 2.600/Kg.

Salah satu fungsi kelompok tani teh yaitu menjamin pembayaran hasil panen sesegera mungkin untuk petani. Hal ini tentu menjadi peran yang sangat penting, karena pembayaran hasil panen oleh pabrik yang disuplai baru dapat dilakukan sekitar dua minggu semenjak teh disuplai ke pabrik oleh kelompok tani. Skema tersebut dapat berjalan karena kelompok tani memiliki simpanan dana yang berasal dari berbagai sumber bantuan di masa lampau. Saat ini, setiap mengumpulkan hasil panen, petani akan menerima bayaran sesuai jumlah teh yang mereka kumpulkan. Dari setiap kilogramnya, petani wajib menyimpan Rp 100 di koperasi,



uang ini lah yang menjamin pembayaran dari kelompok ke petani dapat berjalan dengan segera di kemudian hari. Selain itu, kelompok juga menyediakan pinjaman pupuk bagi anggotanya, dan dapat dilunasi saat anggota memiliki cukup uang.

“Patani mah diantosan ku seeng nyengsreng, enjing-enjing panen, siangna kedah meser beas. Teu tiasa patani ngantosan artos ti pabrik, maenya bade tuang dua minggon sakali”

Di samping melakukan penjualan teh ke pabrik sebagai tujuan utama, Poktan Tanimulya juga dapat mengolah teh menjadi berbagai produk turunan ketika terdapat permintaan atau jika akan mengikuti pameran. Produk turunan yang dapat diproduksi poktan ini diantaranya adalah teh celup, teh specialty, coklat matcha, green tea, white tea, hingga matcha latte. Produk turunan tersebut biasanya dipesan oleh cafe di berbagai wilayah di Indonesia.

Berdasarkan hasil observasi secara umum, di Kecamatan Pasirjambu produksi normal kopi adalah 5-10 Kg/pohon, atau rata-rata 8 Kg/pohon. Satu hektar kebun kopi rata-rata berisikan 2.000 batang pohon kopi. Produktivitas normal dari tanaman kopi adalah 1,6 Ton/Ha. Tahun 2023 produktivitas menurun karena faktor cuaca dan iklim, sehingga produktivitas hanya mencapai 1 Ton/Ha. Harga *cherry* kopi ketika mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dengan faktor yang paling utama dipengaruhi oleh kelangkaan pasokan untuk memenuhi permintaan pasar. Pada tahun 2021, harga rata-rata *cherry* kopi adalah Rp9.000/Kg, sementara saat ini (sejak 2022-2023) harga *cherry* kopi mencapai Rp 14.000/Kg

Di Kampung Ciseupan, Desa Cibodas, Kec. Pasirjambu, rata-rata petani kopi menjual *cherry* ke pengepul yang kemudian oleh pengepul tersebut dijual kembali ke pengepul yang lebih besar/pengolah. Hanya satu orang di lokasi ini yang mengolah *cherry* hingga menjadi *green bean*. Harga jual *green bean* bervariasi bergantung pada proses pengolahan yang diterapkan, karena membutuhkan waktu pengolahan yang berbeda pula. Harga jual *green bean* diantaranya:

- Fully-washed Rp 140.000/Kg
- Natural Rp 150.000/Kg
- Extended anaerob Rp 170.000/Kg

Penyusutan dalam produksi *green bean* kopi cukup besar. Dari 10 kg *cherry*, hanya akan dihasilkan 1,5 kg *green bean* yang siap jual, setelah melalui serangkaian proses mulai dari pencucian, penjemuran, hingga sortasi biji. Informan menjual kopinya kepada seorang rekan. Rekanan tersebut membantunya menjual *green bean* ke beberapa kedai kopi di Kota Bandung dan Jakarta.

Untuk komoditas labu siam di Kecamatan Pasirjambu rata-rata petani memiliki lahan seluas 200 tumbak atau 2.800 m². Hasil panen rata-rata dari 2.800 m² adalah 150-200 Kg saat kemarau seperti saat ini pada saat dilakukan observasi, dengan harga Rp 12.000/Kg di pengepul dan Rp 14.000 di pasar tradisional (karena sedikit yang bertahan produksi, sehingga barang langka). Sedangkan ketika ketersediaan normal, hasil panen rata-rata dari 2.800 m² dapat mencapai 400-500 Kg, dengan harga bervariasi antara Rp 1.000 - Rp 3.000/Kg (barang melimpah, maka harga turun). Labu siam dapat dipanen 3-4 kali dalam satu minggu. Jika disimpulkan, pendapatan petani labu siam saat musim kemarau paling sedikit adalah Rp 5.400.000/minggu dan paling sedikit Rp 1.200.000/minggu saat hasil panen normal. Petani dapat langsung menjual hasil panennya kepada pengepul yang terdapat di desa. Petani bebas menjual hasil panennya ke mana pun, tidak memiliki hubungan piutang dengan pengepul karena kebutuhan pupuk labu siam dapat dipenuhi dengan modal sendiri.

Menurut Petugas Penyuluh Lapangan di Kecamatan Pasirjambu, Labu Siam merupakan komoditas utama di wilayah Pasirjambu karena budidaya yang mudah,



menghasilkan panen yang banyak, tidak banyak hama yang menyerang Labu Siam, biaya infrastruktur yang terhitung murah seperti bambu (media tumbuh) yang digunakan untuk Labu Siam merambat, yaitu dengan biaya Rp10.000/m². Selain itu, Labu Siam dirasa cocok untuk ditanamkan pada dataran tinggi. Panen Labu Siam di Pasirjambu mencapai 60 ton/hari dengan harga jual Rp. 10.000 - Rp. 13.000/kg. Petani yang memiliki lahan lebih dari 1 hektar bisa mengakses kepada pasar langsung biasanya di kirim ke pasar di Bandung dan Soreang namun hanya sedikit petani yang memiliki akses pasar langsung. Mayoritas petani sangat dipengaruhi oleh peran tengkulak karena mereka merasa lelah harus bertani dan mendistribusikan hasil taninya.

“Kita mah taunya tani weh tani, tapi pas ninggali harga di internet teh usap dada. Meren, ada yang hidup juga dari hasil tanah kita misalnya tengkulak pasti itu teh harga di kebun sama udah naik mobil naik”

Pola tanam komoditas Labu Siam maksimal setiap 3-5 tahun ditumpangsarikan dengan komoditas lainnya seperti Cabe, seledri, selada dan kubis. Harga sayuran yang tidak stabil, tidak seperti beras yang harganya sudah ditentukan oleh pemerintah dan mekanisme pasar yang tidak bisa diprediksi sehingga *“tanam ikhlas”* menjadi kunci, salah satu informan, yaitu Bapak Uus dalam melakukan bisnis pertaniannya. Para tengkulak biasanya mengirimkan ke pasar pada pukul 14.00 WIB dan hampir setiap desa memiliki tengkulaknya masing-masing. Bukan hanya mengumpulkan Labu Siam tetapi juga sayuran lainnya yang ditanam oleh para petani.

Hibah Kartu Tani Sibedas

Terdapat 80 kelompok yang mendapatkan bantuan kartu tani Sibedas di tahun 2023. Bantuan paling besar diberikan kepada kelompok Muliasari yang beranggotakan 174 orang atau Rp. 87.000.000. Sementara bantuan yang paling kecil kepada kelompok Mitra Taruna Mukti yang beranggotakan 11 orang atau 5.500.000. Bantuan yang disalurkan oleh Kartu Tani Sibedas tahun 2023 adalah Rp. 1.864.000.000 kepada 3728 anggota tani.

Bentuk bantuan yang diberikan bukan hanya sekedar pupuk non-subsidi dengan harga Rp. 900.000 melainkan peran PPL dan ketua kelompok menjadi penting dalam memberikan fasilitas kepada anggota untuk memberikan kesepakatan jenis bantuan apa yang dibutuhkan selain pupuk misalnya alat sprayer, mesin pemotong rumput dan sepatu boots yang dimiliki secara bersamaan. Namun jenis bantuan selain pupuk non-subsidi sangat dipengaruhi oleh keputusan bersama kelompok masing-masing. Bantuan pasca produksi belum banyak dimiliki karena petani membutuhkan bantuan langsung kepada ketika dilahannya.

Pada bantuan kartu tani Sibedas, ketua kelompok berkoordinasi dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk memberikan keanggotaannya. Namun, masih terdapat kasus keanggotaannya tidak semua mendapatkan bantuan dari kartu tani Sibedas. Dilansir dari wawancara PPL dan Ketua kelompok mereka tidak tahu apa yang menyebabkan beberapa anggotanya tidak mendapatkan kartu tani Sibedas. Sehingga kelompok bersepakat untuk membagi bantuan yang anggota dapatkan kepada anggota yang tidak dapatkan seperti memberikan 5 kg pupuknya atau bantuan dibagikan jumlahnya sama rata.

PPL sangat terbantu dengan adanya bantuan kartu tani Sibedas karena meningkatkan interaksi/pertemuan dengan kelompok tani dan ketua kelompok tani bisa berkumpul dengan anggotanya karena hal ini sulit untuk mereka dapatkan mengingat bahwa petani lebih pasif ketika ada kegiatan kumpul-kumpul. Selain itu, PPL juga bisa lebih mengetahui jenis bantuan dan karakter dari setiap kelompok misalnya komoditas yang paling banyak ditanam dari kelompok, ketua kelompok yang memiliki gender perempuan.



Menurut data yang disampaikan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Kecamatan Nagreg, terdapat 38 kelompok tani dengan jumlah 1379 orang petani yang mendapatkan bantuan hibah kartu tani Sibedas pada tahun 2023. Dengan sebaran penerima di 8 desa dengan total nominal uang Rp689.500.000. Hibah kartu tani Sibedas sudah selesai didistribusikan kepada petani dari tanggal 5 Oktober sampai 31 Oktober 2023 dengan rincian 4 kelompok tani memilih untuk mengalokasikan untuk benih dan 34 kelompok tani mengalokasikan untuk pupuk. Dalam penentuan alokasi input pertanian yang akan dibeli oleh kelompok tani, tidak ada paksaan dari penyuluh mengenai alokasi apa yang akan digunakan oleh kelompok tani, diberikan hak sepenuhnya kepada kelompok tani untuk menentukan alokasi penggunaan dana melalui musyawarah mufakat.

Kecamatan Ciparay, terdapat 82 kelompok tani dengan jumlah 2930 orang petani yang mendapatkan bantuan hibah kartu tani Sibedas pada tahun 2023. Dengan sebaran penerima di 13 desa dengan total nominal uang Rp1.455.000.000. Hampir 99 % alokasi dana di kelompok tani digunakan untuk pupuk non subsidi, dan sisanya digunakan untuk handsprayer yang penentuannya diserahkan kepada kelompok tani melalui musyawarah mufakat.

Kecamatan Bojongsoang, terdapat 32 kelompok tani yang mendapatkan bantuan hibah kartu tani Sibedas pada tahun 2023. Dari jumlah 32 poktan penerima kartu tani Sibedas, 16 poktan melakukan pembelian pupuk, 10 poktan melakukan pembelian pupuk dan handprayer, 2 poktan melakukan pembelian pakan ternak, 3 poktan melakukan pembelian Mesin pompa, hands prayer dan pupuk, dan 1 poktan melakukan pembelian benih padi dan pupuk. Pengalokasian dan penentuan input dan saprodi yang dibeli kelompok tani diserahkan kepada kelompok tani melalui musyawarah mufakat, meskipun masih bergantung keputusannya kepada Ketua Kelompok Tani dan peran PPL seperti pembagian bantuan yang diratakan untuk setiap anggota berdasarkan musyawarah bersama antara anggota. Pada tahun 2023 ini diajukan 50 kelompok tani untuk mendapatkan hibah dan yang tervalidasi adalah sebanyak 32 kelompok tani.

Kartu Tani Sibedas, Resiliensi, dan Kolektivitas Masyarakat Pedesaan

Program Kartu Tani Sibedas mencerminkan banyak program subsidisasi petani di dunia internasional, yang berpotensi mendorong terbangunnya aksi kolektif. Beberapa studi terdahulu, bahkan 30 dasawarsa ke belakang seperti yang ditunjukkan oleh Staatz (1987), menunjukkan bahwa insentif petani dapat mendorong aksi kolektif di antara para petani. Di dalam studinya, Staatz menunjukkan bahwa insentif yang diterima oleh petani di dalam koperasi dan mendorong aksi kolektif dapat dilihat sebagai sebuah bentuk biaya transaksi. Di lain studi, Valdez (2012) menunjukkan bahwa insentif yang diperoleh dari organisasi koperasi dapat mendorong terjadinya transformasi di sektor pertanian dan memobilisasi petani untuk bergerak secara kelompok. Sejalan dengan ini, studi intensif yang dilakukan oleh Jeremie Forney dan tim (Forney & Haberli, 2017; Forney, 2016) menunjukkan bahwa pola-pola insentif yang beragam di sektor pertanian Eropa, termasuk melalui *multi-purpose agriculture*, tidak hanya mendorong terbangunnya kerjasama dan aksi kolektif, tetapi juga membangun otonomi petani secara lebih kuat.

Di dalam konteks penelitian ini, kami melihat bahwa kelompok tani memiliki peran yang kuat di dalam pengambilan keputusan **kolektif**, yang kemudian tercermin dan dikuatkan melalui program kartu tani Sibedas. Kartu tani dinilai mendorong terbangunnya interaksi sosial yang baik antara petani di dalam kelompok tani. Petani yang selama ini tidak tergabung dalam kelompok menjadi tertarik melalui program kartu tani. Meskipun motivasi utama bergabung dalam kelompok tani adalah penyaluran bantuan, tetapi melalui interaksi terus menerus, petani juga secara tidak langsung memperoleh manfaat kelompok yang lain.

Sehubungan dengan kolektivitas tersebut, hal yang perlu dicatat juga adalah bahwa **konsep sama rata** menjadi nilai yang masih lebih diutamakan dibandingkan keadilan yang proporsional. Proporsionalitas ini selama ini menjadi filosofi dari subsidi kartu tani nasional, yang tidak sepenuhnya dilihat dengan baik oleh para petani. Bagi beberapa petani, khususnya petani kecil, konsep sama rata ini lebih bermanfaat dibandingkan konsep proporsional, di mana petani besar memperoleh bantuan yang lebih besar pula. Dalam pandangan mereka, petani besar seharusnya sudah tidak perlu lagi memperoleh bantuan karena skala ekonomi yang mereka miliki. Hal ini menjadi ciri yang khas dari kelompok petani kecil yang, menurut van der Ploeg (2018), termasuk ke dalam kategori *peasant farmers*. Petani dalam kategori gurem (*peasant*) ini berbeda dengan petani entrepreneurial yang menghargai peran dan upaya individu, sehingga mendorong bantuan yang bersifat proporsional. Masyarakat petani gurem menghargai konsep sama rata sebagai bagian dari upaya kolektif mereka di dalam membangun semangat kebersamaan. Program kartu tani Sibedasi, oleh karena itu, berjalan seiringan dengan karakteristik masyarakat petani kecil di Jawa Barat yang masih dicirikan oleh semangat kolektivitas tersebut.

Penting untuk diperhatikan bahwa hubungan patron-klien antara ketua/pengurus dan anggota kelompok tani masih terlihat di beberapa tempat. Ketua kelompok tani memiliki pengaruh yang kuat di antara para petani karena posisi sosial dan ekonominya (misal, sebagai bandar atau pemilik perusahaan). Atas dasar ini, akan selalu ada beberapa hal yang tidak terungkap saat wawancara, seperti sejauh mana individu petani dapat mengambil keputusan dan memperoleh akses yang adil terhadap manfaat kartu tani. Hubungan patron-klien ini juga merujuk pada studi yang dilakukan oleh Vicol et al (2018) di pertanian kopi di Jawa Barat. Di dalam kacamata Vicol et al., hubungan patron-klien antara ketua kelompok tani dan anggota berpotensi memberikan keuntungan lebih kepada para elite, yang berimplikasi pada kerugian bagi anggota. Meskipun demikian, kami menilai bahwa hubungan patron-klien yang ditemukan di penelitian kami dapat mendorong proses-proses adaptasi dan resiliensi di tingkat kelompok dan individu, sehingga memiliki muatan yang lebih positif. Hal ini tentunya akan bergantung pada peran individu patron dan sejauh mana patron tersebut dapat mendorong pemberian manfaat yang adil dan pelibatan klien secara lebih mendalam di dalam pengambilan keputusan.

Selain hal tersebut di atas, kami juga melihat bahwa **fleksibilitas program**, walaupun bukan atas dasar perencanaan/by design, memberikan ruang bagi petani dan kelompok tani untuk bermanuver di dalam membangun otonominya mengelola bantuan kartu tani secara kolektif. Kami menilai bahwa otonomi petani menjadi sesuatu yang semakin penting di Indonesia. Di negara-negara Eropa, otonomi petani merupakan aspek yang sama pentingnya (atau lebih penting) dari pendapatan petani, karena otonomi memberikan kemerdekaan kepada petani untuk menentukan strategi penghidupannya sendiri (Forney, 2016). Hal ini menjadi karakteristik kuat dari definisi kedaulatan pangan yang diusung oleh organisasi internasional Via Campesina (Dwiartama et al., 2023). Otonomi petani juga menjadi basis bagi kritik kuat terhadap pendekatan pemerintah/sector swasta seperti *contract farming*, yang mengikat para petani dengan pasar, modal, dan teknologi (White & Wijaya, 2022; Vicol et al., 2022). Pendekatan seperti *contract farming*, meskipun di atas kertas memberikan keuntungan dan peningkatan pendapatan bagi petani, menghilangkan otonomi dari petani itu sendiri. Petani tidak lagi memiliki kebebasan memilih pasar dan teknologi yang digunakan untuk sistem pertanian mereka. Sebaliknya, kami menilai bahwa fleksibilitas yang diberikan oleh program ini justru melepaskan petani dari ikatan sebagaimana dimaksud, dan memberikan ruang bagi petani untuk membangun otonominya di dalam menjalankan pertanian dengan cara-cara mereka.

Hal ini tentunya sejalan dengan sifat Kartu tani Sibedasi yang non-diskriminatif terhadap bentuk sarana produksi pertanian yang dibutuhkan. Hal yang jelas membedakan



program kartu tani Sibedas dan kartu tani nasional adalah dimungkinkannya petani mengakses **pupuk non-subsidi**. Hampir semua petani yang kami wawancarai mengakui bahwa pupuk non-subsidi memiliki kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, meskipun para petani memperoleh pupuk non-subsidi yang lebih sedikit dibandingkan pupuk bersubsidi dengan nilai bantuan yang sama, pupuk tersebut dapat meningkatkan produktivitas pertanian mereka secara lebih signifikan. Fenomena ini menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah di dalam membangun kebijakan pupuk bersubsidi, yang bisa jadi tidak efektif membantu petani meningkatkan hasil pertaniannya.

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa Kartu tani Sibedas saat ini berperan sebagai program **pengurang beban** (*relief*), layaknya bantuan langsung tunai. Hal ini karena nilainya tidak signifikan dibandingkan kebutuhan umum petani di dalam siklus tanamnya, serta ketidakjelasan kontinuitas dari program, yang menyulitkan petani untuk bisa mengintegrasikan kartu tani Sibedas ke dalam strategi penghidupan dan perencanaan tani mereka. Petani secara umum menilai bahwa kartu tani Sibedas bermanfaat, tapi sebatas dipersepsikan sebagai ‘penghibur’ di tengah kesulitan mereka. Banyak studi yang telah mengidentifikasi sejauh mana peran program-program pengurang beban seperti bantuan langsung tunai (*cash transfers*) bagi penghidupan masyarakat. Salah satu yang menjadi temuan penting ditunjukkan oleh Fisher et al. (2017) dalam studi mereka di sub-saharan Afrika, yang menggarisbawahi bahwa sekalipun program pengurang beban ini dinilai positif oleh masyarakat (seperti juga ditunjukkan oleh Hajdu et al., 2020), sifatnya yang tidak kontinu tidak akan memiliki dampak besar bagi penghidupan mereka. Agar berdampak, bantuan seperti ini perlu diberikan secara rutin dan dapat diprediksi oleh masyarakat (baik dalam hal jumlah maupun waktu), agar masyarakat dapat membangun perencanaan dalam strategi penghidupan mereka.

Dalam kaitannya dengan faktor-faktor penentu resiliensi masyarakat, setidaknya dari 10 faktor yang diangkat oleh Berkes dan Ross (2012), terdapat enam faktor yang terlihat secara umum di kelompok-kelompok tani di empat kecamatan studi kasus, sebagai berikut (tanda positif dan negatif menunjukkan kekuatan atau kelemahan di faktor tersebut):

- *Positive outlook* (+): Petani memiliki cara pandang positif terhadap bantuan
- *People-place relationship* (-): Ikatan terhadap lahan berkurang karena kepemilikan dan akses
- *Diverse economies* (-): Beberapa lokasi memiliki ketergantungan pada 1 komoditas utama
- ***Leadership* (+): Kepemimpinan di poktan kuat**
- ***Engaged governance* (+): Peran PPL sebagai ujung tombak pemerintah dalam tata kelola**
- ***Social networks* (+): Jejaring sosial dan kohesi sosial yang baik**

Tiga faktor terakhir, yaitu kepemimpinan, tata kelola yang kuat, dan jejaring sosial, adalah faktor penentu resiliensi yang didorong/dimunculkan dengan adanya Kartu Tani Sibedas. Dalam hal ini, meskipun kartu tani tidak dilihat cukup signifikan dalam meningkatkan modal finansial petani, tetapi dapat membantu mendorong terbangunnya modal sosial masyarakat dalam skema penerapan saat ini. Hal yang sama juga ditemukan di dalam studi yang dilakukan oleh Dwiartama et al. (2023), yang melihat bahwa di dalam masyarakat yang masih memiliki ikatan yang kuat, program-program pemerintah yang berhasil adalah yang dapat mendorong terbangunnya kepemimpinan dan jejaring sosial, selain juga memberikan ruang bagi otonomi dan diversifikasi penghidupan di tingkat rumah tangga. Sama halnya dengan temuan ini, studi yang dilakukan oleh Kresna (2021) menunjukkan bahwa modal sosial merupakan aset yang sangat berharga di dalam



masyarakat pedesaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan resiliensi masyarakat dari berbagai guncangan. Di dalam studi ini, kami menemukan bahwa tidak hanya modal sosial menjadi faktor pendorong diadopsinya program kartu tani secara lebih mendalam, tetapi juga bahwa kartu tani membantu menguatkan modal sosial melalui mekanisme yang ada.

E. PENUTUP

Kesimpulan

1. Kartu tani Sibedas telah tersampaikan dengan baik di penghujung tahun 2023. Meskipun dampak dan manfaat dari kartu tani Sibedas belum terlihat dengan jelas, terdapat beberapa hal yang menunjukkan bagaimana kartu tani Sibedas dapat mendukung strategi penghidupan petani, sekalipun dengan signifikansi yang kecil.
2. Kartu tani Sibedas membantu memahami kompleksitas masalah pertanian dan beberapa pola-pola interaksi sosial yang masih kental terlihat di masyarakat pedesaan Kabupaten Bandung. Salah satu yang terlihat dari pelaksanaan Kartu Tani Sibedas adalah masih kuatnya nilai-nilai kebersamaan (kolektivitas) antar petani yang ditunjukkan oleh anggota kelompok tani yang mendapat bantuan hibah yang juga membagi rata bantuan kepada anggota kelompok tani yang tidak mendapatkan bantuan hibah.
3. Kartu Tani tersampaikan dengan baik sebagai bantuan pengurang beban (one-off reliever), tapi belum bisa diintegrasikan dalam kalkulasi strategi petani. Atas dasar ini, perlu dibangun program kartu tani yang sifatnya rutin dan lebih terencana.
4. Unintended positive effect dari Kartu Tani Sibedas terutama adalah membangun modal sosial dan kelembagaan. Skema ini perlu dipertahankan dan diperbaiki penerapannya. Dengan adanya bantuan hibah Kartu Tani Sibedas akan mendorong terciptanya kelompok tani yang lebih aktif dan komunikasi yang lebih intens, baik antar anggota kelompok tani maupun dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Kecamatan.
5. Untuk itu, peran sentral Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan kelompok tani sebagai hub dan leader menjadi faktor kunci di dalam penerapan kartu tani dan program-program serupa. PPL dan kelompok tani dapat diarahkan menjadi penghubung yang mengorganisir petani dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan dan perlindungan petani.

Rekomendasi

Dari kesimpulan tersebut, maka rekomendasi yang diusulkan adalah:

1. Program Kartu Tani perlu dilaksanakan secara terencana dalam hal pewaktuan (*timing*), kontinuitas (rutin tahunan) dan nilai (besaran) yang disesuaikan dengan kebutuhan petani
2. Kartu Tani Sibedas perlu dijalankan sebagai pelengkap (komplementer) Kartu Tani Nasional. Artinya, skema Kartu Tani Sibedas harus dipertahankan berbeda dengan kartu tani nasional, agar petani dapat memiliki fleksibilitas dalam pemanfaatannya.
3. Kartu Tani Sibedas dapat digunakan sebagai *Litmus test* untuk melihat kelembagaan tani, dan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok
4. Kartu Tani perlu terintegrasi dengan program lain, khususnya dalam menjawab tiga isu besar di sektor pertanian Kabupaten Bandung, yaitu: air, lahan, dan tenaga kerja.



DAFTAR PUSTAKA

- Berkes, F., & Ross, H. (2013). Community resilience: toward an integrated approach. *Society & natural resources*, 26(1), 5-20.
- BPS Kab. Bandung. (2023). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung*. [Online] Available at: <https://bandungkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/35df6209127142673449ad5b/kabupaten-bandung-dalam-angka-2023.html> [Accessed 25 12 2023].
- BPS Kab. Bandung-b. (2023). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung*. [Online] Available at: <https://bandungkab.bps.go.id/publication/2023/12/15/5c0c2c580e74baa245ecaa9a/hasil-pencacahan-lengkap-sensus-pertanian-2023---tahap-i-kabupaten-bandung.html> [Accessed 25 12 2023].
- DFID. (2000). *Sustainable Livelihoods Approach and Its Framework*. DFID, UK.
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (2019). *Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Bahan Tayang FGD Kartu Tani*. Depok
- Dwiartama, A. (2014). *Investigating resilience of agriculture and food systems: insights from two theories and two case studies* (Doctoral dissertation, University of Otago).
- Dwiartama, A., Maury, H.K. Ariefiansyah, R. Akbar, Z.A., Ramadhan, S. Kondologit, E. (2023). *Resilience Story: Beyond the success and failure of community-based conservation practices in Jambi and Papua*. ITB Press: Bandung.
- Dwiartama, A., Kelly, M., & Dixon, J. (2023). Linking food security, food sovereignty and foodways in urban Southeast Asia: cases from Indonesia and Thailand. *Food Security*, 15(2), 505-517.
- Fisher, E., Attah, R., Barca, V., O'Brien, C., Brook, S., Holland, J., ... & Pozarny, P. (2017). The livelihood impacts of cash transfers in sub-Saharan Africa: beneficiary perspectives from six countries. *World Development*, 99, 299-319.
- Forney, J., & Häberli, I. (2017). Co-operative values beyond hybridity: The case of farmers' organisations in the Swiss dairy sector. *Journal of Rural Studies*, 53, 236-246.
- Forney, J. (2016). Blind spots in agri-environmental governance: some reflections and suggestions from Switzerland. *Review of Agricultural, Food and Environmental Studies*, 97(1), 1-13.
- Gunawan, Endro. dan Pasaribu, Sahat. (2020). Persepsi Petani Dalam Implementasi Program Kartu Tani Untuk Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 28, No. 2, 2020*
- Gunderson, L. H., & Holling, C. S. (Eds.). (2002). *Panarchy: understanding transformations in human and natural systems*. Island press.



- Hajdu, F., Granlund, S., Neves, D., Hochfeld, T., Amuakwa-Mensah, F., & Sandström, E. (2020). Cash transfers for sustainable rural livelihoods? Examining the long-term productive effects of the Child Support Grant in South Africa. *World Development Perspectives*, 19, 100227.
- Kresna, R. (2021). *Social Capital, Resilience, and Smallholder Dairy Farmers: A Case Study of Four Communities in West Java, Indonesia* (Doctoral dissertation, University of Otago).
- Mufidah, N., & Prabawati, I. (2018). Implementasi program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Durung Bedug, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Working Paper Universitas Negeri Surabaya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Peraturan Bupati Bandung nomor 138 Tahun 2021 tentang Program Petani Bedas Sejahtera
- Scoones, I. (2015). *Sustainable livelihoods and rural development* (p. xv). Rugby: Practical Action Publishing.
- Staatz, J. M. (1987). Farmers' incentives to take collective action via cooperatives: a transaction cost approach. *Cooperative theory: New approaches*, 18, 87-107.
- Walker, B., Holling, C. S., Carpenter, S. R., & Kinzig, A. (2004). Resilience, adaptability and transformability in social-ecological systems. *Ecology and society*, 9(2).
- White, B., & Wijaya, H. (2022). What kind of labour regime is contract farming? Contracting and sharecropping in Java compared. *Journal of Agrarian Change*, 22(1), 19-35.
- Valdez, S. (2011). Subsidizing the cost of collective action: International organizations and protest among polish farmers during democratic transition. *Social forces*, 90(2), 475-495.
- Van der Ploeg, J. D. (2018). *The new peasantries: rural development in times of globalization*. Routledge.
- Vicol, M., Neilson, J., Hartatri, D. F. S., & Cooper, P. (2018). Upgrading for whom? Relationship coffee, value chain interventions and rural development in Indonesia. *World Development*, 110, 26-37.
- Vicol, M., Fold, N., Hambloch, C., Narayanan, S., & Pérez Niño, H. (2022). Twenty-five years of Living Under Contract: Contract farming and agrarian change in the developing world. *Journal of Agrarian Change*, 22(1), 3-18.